



Analisis Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Analysis of General and Special Allocation Funds for Regional Expenditures at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Kebumen Regency

Suratno

Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen, Indonesia

*Email: ar dara1969@gmail.com

*Correspondence: Suratno

DOI:

10.59141/comserva.v2i12.716

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 02-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Diterbitkan : 25-04-2023

Tujuan penelitian untuk menganalisis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yaitu membagi Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah dikali 100%, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah yaitu membagi Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah dikali 100%. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah tahun 2019-2021 termasuk dalam kriteria baik yaitu tahun 2019 sebesar 45,35% berkriteria “baik”, tahun 2020 41,55% kriteria “baik”, dan tahun 2021 40% kriteria “sedang”. Sedangkan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah tahun 2019-2021 masuk dalam kriteria “sangat kurang” yaitu 2019 sebesar 2,56% kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 2,30% kriteria “sangat kurang”, dan tahun 2021 2,65% “sangat kurang”.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Daerah

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the General Allocation Funds and Special Allocation Funds for Regional Expenditures at BPKPD Kebumen Regency. This research method uses a descriptive research method with a quantitative approach. Data analysis techniques for General Allocation Funds for Regional Expenditures, namely dividing General Allocation Funds with Regional Expenditures multiplied by 100% and Special Allocation Funds for Regional Expenditures, namely dividing Special Allocation Fund with Regional Expenditures multiplied by 100%. The result of this study indicate that General Allocation Fund for Regional Expenditures in 2019-2021 is included in good criteria, namely in 2019 45,35% with “good” criteria, in 2020 41,55% “good” criteria, and in 2021 40% criteria “currently”. Meanwhile, the Special Allocation Fund for Regional Expenditures fro 2019-2021 is included in the very lacking criteria, namely in 2019 it is 2,56% of the “very lacking” criteria, in 2020 2,30% of the “very lacking” criteria, and in 2021 it is 2,56% “very less”.

Keywords: General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Regional Expenditures

Suratno

Analysis of General and Special Allocation Funds for Regional Expenditures at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Kebumen Regency

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan daerah, termasuk mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan dan program yang terkait dengan pembangunan daerah (Yulianah, 2017). Salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kustianingsih et al., 2018).

Di era reformasi, pembangunan di daerah merupakan bagian penting dari pembangunan tingkat nasional dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah (Deswimar, 2014). Menurut (Sangki et al., 2017) prinsip otonomi daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab melaksanakan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada prinsip terbuka, partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban. Pembangunan daerah didanai oleh APBD dalam bentuk DAU dan Dana DAK, namun sering terjadi masalah dalam mengelola DAU dan DAK dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara daerah dan pusat (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Penggunaan DAU dan DAK harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk memastikan bahwa belanja daerah dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Dalil & Hartanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap penggunaan DAU dan DAK oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) (Surjono & Firdaus, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan DAU dan DAK oleh BPKPD dan dampaknya terhadap belanja daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan DAU dan DAK serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kinerja belanja daerah.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah di BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya sesuai prinsip yang telah di tentukan (Hasan, 2020).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK di peruntukan untuk bidang: pendidikan, kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan lain lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat (Situmorang, 2021).

Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2019 Pasal 55, klasifikasi Belanja daerah yaitu belanja: operasi, modal, tidak terduga dan transfer (Tendean et al., 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & - \frac{DAU}{\text{Belanja Daerah}} \cdot 100\% = \% \\ & - \frac{DAK}{\text{Belanja Daerah}} \cdot 100\% = \% \end{aligned}$$

Dalam menganalisis DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah disusun ukuran menurut Keputusan Pemerintah Dalam Negeri berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
➤ 50%	Sangat Baik

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.329*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daftar Data DAU, DAK, dan Belanja Daerah

Tabel 2. Penerimaan DAU

Jenis Anggaran	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.274.201.163.000	1.137.529.034.150	1.179.288.910.000

Sumber: *BPKPD Kebumen*

Tabel 3. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Bidang (Kegiatan)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Infrastruktur Jalan	20.820.374.000	3.412.500.000	9.439.902.000
Pertanian (Ketahanan Pangan)	4.478.593.315	3.934.398.000	3.867.200.000
Pelayanan Dasar	-	3.366.366.000	8.748.768.800
Kesehatan dan Kefarmasian	13.556.304.009	16.582.319.463	24.139.781.943
Pendidikan	9.084.650.166	19.232.291.750	12.725.078.237
Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000	2.337.216.000	2.715.051.000
Infrastruktur Sanitasi	6.492.000.000	4.538.883.000	4.257.917.398
Infrastruktur Air Minum	3.492.258.000	2.937.746.000	4.993.032.730
Keluarga Berencana (KB)	-	1.039.276.672	1.027.732.500
Infrastruktur Irigasi	3.409.482.000	2.246.857.815	2.303.464.000
Sarana Perdagangan	5.013.280.150	1.517.577.250	1.351.219.000
Kelautan dan Perikanan	922.575.288	998.716.070	1.309.398.415
Lingkungan Hidup (Kehutanan)	278.355.000	640.000.000	1.447.279.000
Pariwisata	1.512.879.400	-	-
Total	72.033.041.328	62.784.148.020	78.325.825.023

Sumber: *BPKPD Kebumen*

Tabel 4. Realisasi Belanja Daerah

Jenis Belanja	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Operasi	1.880.683.876.699	1.839.589.218.113	2.049.240.910.000
Belanja Modal	365.840.794.028	288.801.049.018	291.188.892.000

Suratno

Analysis of General and Special Allocation Funds for Regional Expenditures at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Kebumen Regency

Belanja Tak Terduga	570.000	10.188.825.249	10.001.300.000
Belanja Transfer	563.024.203.900	599.282.823.700	596.895.365.000
Total	2.809.549.444.627	2.737.861.916.080	2.947.326.467.000

Sumber: BPKPD Kebumen

Analisis DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah

Besaran DAU perlu dilakukan perhitungan sesuai dengan data yang sudah tertera diatas, berikut perhitungan besaran Dana Alokasi Umum tahun 2019-2021:

a. Tahun 2019 = $\frac{1.274.201.163.000}{2.809.549.444.627} \times 100\%$
= 45,35%

Jadi, besaran DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada 2019 sebesar 43,35%.

b. Tahun 2020 = $\frac{1.137.529.034.150}{2.737.861.916.080} \times 100\%$
= 41,55%

Jadi, besaran DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada 2020 sebesar 41,55%.

c. Tahun 2021 = $\frac{1.179.288.910.000}{2.947.326.467.000} \times 100\%$
= 40%

Jadi, besaran DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada 2021 sebesar 40%.

Untuk mengetahui besaran Dana Alokasi Khusus perlu dilakukan perhitungan sesuai data yang sudah ada (Marizka, 2013), berikut perhitungan Dana Alokasi Khusus tahun 2019-2021 :

a. Tahun 2019 = $\frac{72.033.041.328}{2.809.549.444.627} \times 100\%$
= 2,56%

Jadi, besaran DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada 2019 sebesar 2,56%

b. Tahun 2020 = $\frac{62.784.148.020}{2.737.861.916.080} \times 100\%$
= 2,30%

Jadi, besaran DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2020 sebesar 2,30%

c. Tahun 2021 = $\frac{78.325.825.023}{2.947.326.467.000} \times 100\%$
= 2,65%

Jadi, besaran DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2021 sebesar 2,65%.

Rekapitulasi dan Grafik Besaran DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah 2019 - 2021

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui berapa besar DAK dan DAU pada Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2019-2021, lihat tabel dibawah ini :

Tabel 5. Rekapitulasi DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah

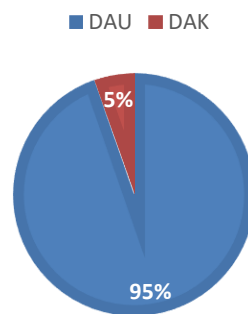
	DAU terhadap Belanja Daerah	Kriteria
2019	45,35%	Baik
2020	41,55%	Baik
2021	40%	Sedang
	DAK terhadap Belanja Daerah	Kriteria
2019	2,56%	Sangat Kurang
2020	2,30%	Sangat Kurang
2021	3%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Suratno

Analysis of General and Special Allocation Funds for Regional Expenditures at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Kebumen Regency

Dari tabel hasil rekapitulasi diatas juga dapat dilihat dengan diagram dibawah ini :



Gambar 1. Diagram besaran DAU & DAK terhadap Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah

Dari tabel dan diagram DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah selama 3 tahun diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada penerimaan DAK terhadap Belanja Daerah. Walaupun dari analisis perhitungan DAU terhadap Belanja Daerah ditahun 2019-2021 mengalami penurunan terus menerus tetapi masuk dalam kriteria baik, sedangkan Dana Alokasi Khusus diatas mengalami kenaikan dan penurunan dari 2019-2021 dan termasuk dalam kriteria sangat kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Besaran DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2019-2021 dalam kriteria baik yaitu tahun 2019 sebesar 45,35% kriteria “baik”, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 41,55% masuk dalam kriteria “baik”, dan ditahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 40% kriteria “Sedang”. 2) Besaran DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2019-2021, untuk tahun 2019 sebesar 2,56% kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 2,30% kriteria “sangat kurang”, dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,65% kriteria yang sama “sangat kurang”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Dalil, A., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178–184.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Hasan, P. P. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah (studi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 17(2), 20–40.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tanduk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Situmorang, Y. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Simalungun*.
- Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) pemerintah daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357–1368.
- Tendean, L., Tinangon, J. J., & Datu, C. V. (2021). Evaluasi Penerapan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 198–208.
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608–627.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).